



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1516>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**PEMBELAJARAN DARI PENANGANAN COVID-19
MELALUI PROGRAM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Jilid I di Provinsi Jawa Timur)**

Bayu Krisna Ardiansyah¹, Regia Nadila Pradini²

^{1,2} Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Corresponding author: ardiansyah.10bayu@gmail.com

Received: 07 Maret 2021, Accepted: 03 November 2021; Published Online: 19 November 2021

ABSTRAK

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 yang telah menjadi pandemi dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pembelajaran apa yang didapatkan dalam penegakan program PPKM untuk mengurangi dampak dari pandemi sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan lainnya. Penulisan penelitian ini menggunakan tiga macam sumber yaitu dari berbagai media massa, penelitian terdahulu dan survei lapangan dengan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Hasil kajian adalah bahwa ada delapan kunci utama dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Kunci utama tersebut adalah transparansi, pemimpin yang tanggap, perbaikan kebijakan, forum masyarakat, vaksinasi, peningkatan kualitas kesehatan, evaluasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi.

Kata Kunci: Pandemi; Pembuatan Kebijakan; Respon Kebijakan; Dampak PPKM

ABSTRACT

The implementation of Enforcement of Limitations on Community Activities (ELCA) is one of Indonesia government's response to COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to determine what kind of learning is obtained in the enforcement of PPKM program to reduce the impact of this pandemic so that it can be a reference for the government and more. The writing of this research uses sources from various mass media, previous research and field surveys using phenomenological qualitative research methods. The results of the study shows there are eight main keys in COVID-19 pandemic response in East Java. The main keys are information transparency, responsive leadership, policy improvement, community forums, vaccination, health quality improvement, policy evaluation, and technology utilization.

Keywords: Pandemic; Policy-making; Policy responses; Impact of PPKM

Copyright (c) 2021 Bayu Krisna Ardiansyah, Regia Nadila Pradini

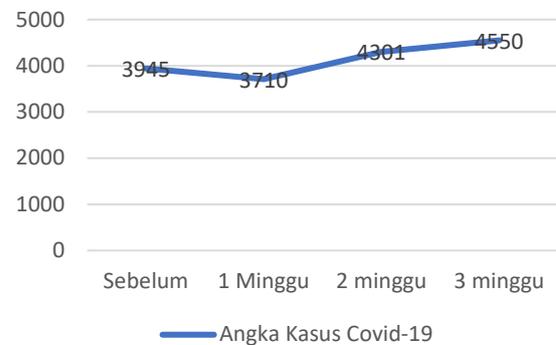


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020 pandemi COVID-19 telah mulai menyebar keseluruh dunia. Coronavirus baru termasuk dalam genus beta dari coronavirus. Virus COVID-19 yang ditetapkan menjadi pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 merupakan tantangan utama kesehatan dunia. Saat ini virus COVID-19 telah menginfeksi sekitar 114 juta penduduk dunia. Indonesia mendapatkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dan kini kasusnya telah mencapai 1.329.074 kasus pada tanggal 27 Februari 2021 (The Center for Systems Science and Engineering (ACCE): 2020). Penyebaran yang sangat mudah dan banyaknya penduduk di Indonesia membuat kasus COVID-19 semakin banyak. Apalagi dengan adanya beberapa libur panjang yang berdampak pada semakin meningkatnya kasus per hari. Peningkatan kasus seperti pada libur panjang tanggal 28 Oktober 2020 hingga 1 November 2020. Berikut perkembangan kasus covid pasca libur panjang akhir Oktober.

Angka Kasus COVID-19 Di Indonesia Sebelum dan Pasca Libur Panjang Akhir Oktober 2020



Sumber: Wikipedia, diolah oleh penulis

Merujuk tabel tersebut menunjukkan bahwa angka kasus COVID-19 meningkat 15% pada minggu ketiga pasca libur panjang dibandingkan dengan sebelum libur panjang. Sehingga jika terus Sumber: Wikipedia, diolah oleh penulis dibiarkan maka peningkatan ini akan bertambah seiring banyaknya libur panjang. Hasil penelitian terhadap pengembangan angka kasus COVID-19 di Indonesia ini terus-menerus dilakukan dalam mencari solusi terbaik untuk penanganan pandemi ini.

Kajian-kajian dan penelitian tentang upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan telah memunculkan beberapa regulasi baik dari lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Salah satu program pemerintah dalam upaya menangani peningkatan kasus COVID-19 adalah dengan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Program PSBB bertujuan untuk mengurangi kegiatan masyarakat di luar rumah. Namun, di setiap program yang cetuskan akan selalu ada dampak positif maupun negatif. Jika di lihat dari sudut pandang golongan lansia hal ini dapat melindungi mereka dari ancaman virus COVID-19. Akan tetapi, bagi pekerja yang mengharuskan mereka untuk keluar rumah tentu ini sangat berdampak pada kondisi ekonominya.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang menerapkan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan program lanjutan dari program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perbedaan pada program sebelumnya adalah masyarakat masih dapat melakukan aktivitas di luar rumah

meskipun ada pembatasan. Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ada beberapa aturan dalam pembatasan yang pada intinya melakukan pembatasan dengan tetap menjalankan roda perekonomian dan beberapa sektor lainnya yang memenuhi syarat.

PPKM yang diterapkan di Provinsi Jawa Timur berlaku mulai tanggal 11-25 Januari 2020. Akan tetapi tidak semua daerah di Jawa Timur yang menerapkan PPKM. Daerah yang termasuk dalam penerapan PPKM yakni Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Gresik, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sidoarjo. Sampai saat ini program PPKM masih terus berlanjut dan diperbarui. PPKM Jilid I ini banyak berdampak bagi masyarakat khususnya penduduk Jawa Timur. Dari dampak tersebut maka penulis melakukan riset terkait Pembelajaran dari Penanganan Virus Corona melalui Program PPKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran yang di dapatkan dari pengelolaan program PPKM jilid I.

METODE

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif-fenomenologi merupakan metode penelitian dengan upaya mencari esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu (Cresswell dalam Hardiwaydoyo: 1998). Data-data penelitian berasal dari berbagai sumber dan hasil wawancara yang dilansir dari berbagai media dengan fokus mengenai pembelajaran dalam program PPKM. Dalam penelitian ini menggunakan 10 sumber data dari media dan beberapa penelitian terdahulu. Sumber data dari media:

- a. www.health.detik.com
- b. www.cnnindonesia.com
- c. www.halodoc.com
- d. regional.kontan.co.id
- e. www.liputan6.com
- f. www.news.detik.com
- g. www.nasional.kompas.com
- h. www.surabaya.tribunnews.com
- i. www.kompas.com
- j. www.abc.net.au

Penelitian ini memfokuskan analisis pada kesimpulan menemukan pembelajaran dari penelitian terdahulu serta dinamika yang terjadi melalui pengamatan berbagai tentang fenomena pandemi COVID-19 di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Referensi dan Konten Kebijakan Kesehatan

Dalam penelitian ini penulis telah mengelompokkan sumber data pada tabel 1 untuk mempermudah penelitian.

Tabel 1. Pengelompokan Sumber Data

No.	Sumber Data	Jumlah
1.	Berita	11
2.	Jurnal	9
3.	Lainnya	4

Salah satu referensi yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah karya dari Rebecca Forman beserta timnya. Rebecca meneliti mengenai 12 pembelajaran dari manajemen pandemi virus corona. Penelitian mereka menghasilkan 12 pembelajaran yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Dari beberapa pembelajaran tersebut kami telah menemukan kesamaan terhadap penerapan PPKM di Indonesia.

- a. Pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan

Dalam penanganan kasus COVID-19, diperlukan adanya kejujuran dan transparansi terhadap informasi kasus. Adanya transparansi dapat membuat keputusan yang dibuat oleh pemerintah lebih terarah dan lebih efektif dalam mencegah penyebaran virus corona. Salah satu pakar teknologi informasi

(IT) muda memberikan pengalamannya dalam membantu Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Ahmad Al Khozi menyampaikan bahwa transparansi sangatlah penting karena memuat data riil yang penting karena jika ada yang disembunyikan sedikit akan dapat membahayakan.

Pada awalnya transparansi terhadap informasi kasus COVID-19 masih belum maksimal karena merupakan kali pertama mendapatkan bencana pandemi. Namun, setelah evaluasi dan perbaikan kini sudah tersedia pangkalan data kasus COVID-19 yang telah di buat oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini membantu masyarakat untuk mengerti daerah-daerah yang rawan penyebaran virus COVID-19. Selain itu, pemerintah lebih mudah mengontrol masyarakat yang rentan terhadap penyebaran virus ini.

Dalam program PPKM, pemerintah telah menerapkan sistem pembatasan dalam skala besar. Pembatasan-pembatasan tersebut seperti pembatasan jam malam yang telah diinformasikan jauh hari sebelum program ini dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih bersiap diri dalam pelaksanaan

program ini. PPKM di Jawa Timur juga melakukan kajian mengenai daerah-daerah yang harus menegakkan aturan PPKM. Kajian tersebut membutuhkan data yang berasal dari pangkalan data COVID-19. Sehingga, transparansi terhadap informasi COVID-19 dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian dalam menentukan keputusan. Selain itu juga, transparansi selama PPKM ini dapat menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya virus COVID-19 dan penyebab di berlakukannya program PPKM ini.

b. Pemimpin yang tanggap dalam merespon gejolak masyarakat

Respon masyarakat terhadap program PPKM awalnya tidak terlalu bagus. Banyak diantara mereka yang mengeluhkan jika program ini diberlakukan maka akan semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan dalam menangani masalah tersebut. Di Jawa Timur sendiri menerapkan sistem PPKM dengan memperketat akses pintu wilayah dan pembatasan waktu operasional umum. Pemberitahuan mengenai program ini telah lama dilakukan sehingga masyarakat dapat lebih bersiap.

Pemerintah meyakinkan kepada masyarakat bahwa program ini diterapkan guna memberi keselamatan bagi masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga telah memberi dana insentif bagi pekerja dengan gaji dibawah 5 juta rupiah. Hal ini sebagai upaya menangani keluhan masyarakat juga sebagai alternatif solusi dalam menjalankan roda perekonomian. Respon masyarakat yang antusias dalam manajemen penanganan COVID-19 inilah, banyak hal yang bisa didapatkan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri tentang dampak dilakukannya program PPKM.

c. Perbaiki kebijakan lebih penting daripada membuat kebijakan yang berbeda

Sebagai upaya dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 telah banyak negara-negara di dunia yang membentuk peraturan-peraturan di negaranya. Tidak jarang negara-negara yang bertetangga akan meniru model penanganan dari negara lain yang dianggapnya efisien dan berhasil. Namun, penduduk di setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak semua regulasi yang diadopsi dari negara lain dapat

berdampak besar pula untuk negaranya. Jika suatu negara menerapkan pembatasan skala besar agar penduduk mereka tidak boleh keluar rumah sama sekali dalam jangka waktu yang tidak ditentukan maka otomatis akan menghancurkan setidaknya sebagian besar ekonomi di negara mereka. Hal ini juga berdampak pada perekonomian negara tetangga. Untuk itu, perlu adanya saling berbagi dan berdiskusi informasi antar negara untuk menemukan jalan terbaik dalam penanganan COVID-19.

Pemerintah Jawa Timur telah menunjukkan keseriusannya dalam membuat keputusan. Contohnya yaitu program PSBB pertama pada tanggal 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020. Kemudian PSBB tersebut diperpanjang dari tanggal 12 Mei 2020 hingga 25 Mei 2020 dan kemudian di perpanjang kembali hingga 8 Juni 2020. Pada PSBB jilid kesatu hingga ketiga telah dilakukan kajian dan evaluasi. Hasil dari kajian tersebut adalah angka penurunan kasus COVID-19 tidaklah turun secara signifikan.

Setelah evaluasi dari PSBB jilid kesatu hingga ketiga itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah memberlakukan kembali program PPKM pada bulan

januari lalu. PPKM ini merupakan hasil dari kajian program PSBB yang telah diperbarui dalam programnya. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menentukan kebijakan kesehatan terhadap masyarakatnya. Perubahan sedikit demi sedikit yang didasari oleh hasil kajian dapat membuat perbaikan dalam manajemen penanganan COVID-19.

d. Adanya forum masyarakat untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda

Melalui program PPKM, pembelajaran yang dapat diambil dalam hubungannya dengan akuntabilitas pemerintah bahwa dalam pengambilan keputusan harus ada solusi dari dampak yang ditimbulkan. Program PPKM bukan semata-mata dibuat hanya dalam artian pembatasan sosial, tapi juga dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat juga telah mengkaji ulang program-program yang telah dilaksanakan. Pemerintah pusat telah banyak melakukan koordinasi antar kepala daerah guna melihat perkembangan dari pelaksanaan program di tiap daerah, seperti halnya

evaluasi dari program PPKM yang sudah berjalan. Dari program PPKM tersebut, pemerintah akan menemukan kendala-kendala yang ada untuk bahan diskusi. Hasil diskusi tersebut akan digunakan sebagai evaluasi program dan perbaikan sistem.

Selain itu, melalui program PPKM membuat lebih banyak forum diskusi mengenai kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Forum-forum diskusi ini mengajak masyarakat umum juga ikut serta untuk mengevaluasi mengenai program PPKM. Sehingga yang diharapkan adalah tercapainya manajemen terbaik dalam penanganan COVID-19 dengan tidak hanya melihat dari sudut pandang pemerintah namun juga masyarakat. Salah satu forum diskusi mengenai PPKM adalah Reses Ketua DPRD yang menjadi forum diskusi.

e. Vaksin bukan akhir dari pandemi tapi langkah awal untuk bergerak

Negara dan individu di seluruh dunia saat ini sedang sibuk bekerja untuk menemukan vaksin COVID-19 serta menangani penderita yang terpapar COVID-19. Virus ini merupakan hal baru bagi sebagian besar negara di dunia. Pengeluaran negara saat ini difokuskan untuk

menangani COVID-19. Vaksin COVID-19 ini memiliki peran penting karena bukan saja akan berdampak pada kesehatan dunia tapi juga pada bidang lainnya. Dengan adanya vaksin masyarakat mulai percaya pada negara dan dapat beraktivitas kembali. Kepanikan massal juga dapat diredam dengan adanya vaksin. Namun, bukan berarti vaksin ini akan selamanya menjadi jalan keluar bagi sebuah negara untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Kerjasama antar negara akan sangat dibutuhkan saat pembuatan vaksin secara bersama-sama.

Negara Indonesia telah banyak mengeluarkan dana untuk penanganan COVID-19. Tidak terkecuali di Jawa Timur sendiri yang banyak memangkas anggaran dari bagian yang bukan prioritas. Tentu saja, jika hal ini tidak diimbangi oleh alternatif solusi maka dampaknya akan lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih giat mencari jalan keluar dari masalah ini.

Salah satu alternatif yang ada adalah vaksinasi. Indonesia sendiri telah membeli Vaksin COVID-19 AstraZeneca-Novavax sebesar 50 juta dosis. Vaksinasi merupakan langkah awal untuk bergerak. Melalui program PPKM, pembatasan masyarakat masih harus dilakukan meskipun telah ada

vaksinasi. Namun bedanya masyarakat masih bisa bekerja meski dengan pembatasan waktu dan mengurangi sedikit demi sedikit jumlah kasus COVID-19 yang ada. Adanya vaksin hanya memberi sedikit jaminan bahwa angka kasus COVID-19 akan menurun. Tapi kedisiplinan dalam penerapan program PPKM menjadi kunci utama dalam penanganan kasus COVID-19.

f. Peningkatan kualitas kesehatan harus terus berlanjut beriringan dengan pengembangan kebijakan kesehatan

Setelah adanya vaksin dan beberapa regulasi yang ada seharusnya dapat meningkatkan kualitas manajemen penanganan COVID-19. Karena tantangan ke depan akan jauh lebih sulit jika tidak diimbangi dengan perbaikan secara terus-menerus. Bagi masyarakat vaksin akan merubah pola pikir mereka bahwa setelah mendapatkan vaksin maka akan aman bagi mereka. Justru sebaliknya, vaksin hanya bertahan dalam kondisi dan waktu tertentu. Sehingga, jika tidak ada program PPKM maka masyarakat akan lebih sulit dikontrol dan penyebaran virus COVID-19 akan lebih merajalela.

Selain itu, negara di dunia masih perlu untuk menguji coba sistem

ketahanan kesehatan mereka dengan selalu mengevaluasi hasil dari program yang dibuat. Seperti halnya virus COVID-19 yang senantiasa bermutasi. Dengan evaluasi demi evaluasi akan banyak menambah pengalaman dalam penanganan pandemi ini.

g. Evaluasi sangat penting dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya

Setelah program PSBB selesai, maka lanjutan dari program tersebut adalah PPKM. PPKM dinilai sebagai perbaikan sistem dari program PSBB terdahulu dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat. Walikota Tri Rismaharini menilai bahwa masyarakatnya tidak bisa terus menerus tinggal di rumah. Mereka harus pergi bekerja untuk menghidupi keluarganya. Respon Walikota Surabaya ini merupakan bentuk kepedulian pemimpin daerah terhadap aspirasi masyarakatnya dan bagian paling penting dalam menentukan kebijakan.

Tidak di pungkiri bahwa masyarakat Indonesia cenderung memiliki sifat yang berani. Dalam kondisi yang tertekan mereka bisa melakukan apapun. Dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja di sektor

informal. Sejak adanya instruksi PSBB banyak industri jasa yang kehilangan pelanggannya, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga banyak dari mereka yang nekat mencari jalan keluar lain untuk belajar demi menyambung hidup mereka dan keluarganya. Oleh sebab itu, tantangan bagi negara Indonesia sangatlah besar utamanya di Jawa Timur.

Ketahanan sistem kesehatan suatu daerah harus juga diimbangi dengan ekonomi yang kuat pula. Dalam program PPKM, masyarakat masih dapat bekerja seperti biasa meskipun harus dibatasi. Selain itu juga, penegakan protokol kesehatan sering digencarkan untuk memaksimalkan program ini.

Seperti yang telah di bahas sebelumnya, bahwa dalam menjalankan program PSBB maupun PPKM pemerintah dengan akuntabilitasnya memberikan bantuan dana guna tetap mempertahankan roda perekonomian di masa pembatasan. Sehingga dampaknya masyarakat akan lebih memiliki kepercayaan terhadap keputusan dari pemerintah. Selain itu juga, dalam penanganan pasien terpapar COVID-19, pemerintah telah

mengeluarkan sebagian besar anggaran untuk pengobatan.

Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Menteri Dalam Negeri telah mengintruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai berikut:

Mengoptimalkan kembali posko satgas COVID-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

h. Pemanfaatan teknologi dalam penanganan COVID-19 di era industri 4.0

Di Indonesia telah memasuki masa dimana teknologi sudah di Industri 4.0, perkembangan teknologi inilah yang digunakan Indonesia sebagai sarana dalam penanganan COVID-19. Salah satu inovasi teknologinya adalah GeNose C-19. GeNose C-19 buatan Universitas Gadjah Mada merupakan alat yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam bentuk “hidung elektronik” yang bisa menganalisa

sampel pernapasan dan mencari tahu adanya virus COVID-19. Dan alat tersebut sudah dalam proses produksi.

Jika produksi alat tersebut selesai dan dapat digunakan maka akan mempermudah mendeteksi virus COVID-19 lebih tepat dan efisien biaya. Selain itu juga, melalui program PPKM masyarakat akan lebih mudah dikontrol jika ingin melakukan tes acak menggunakan alat ini. Misalnya saja pelanggar PPKM di kenakan sanksi melakukan tes menggunakan alat ini. Karena dinilai juga cepat dalam menampilkan hasilnya. Atau dengan melalui program PPKM, masyarakat yang akan bekerja di luar rumah disyaratkan untuk melakukan tes terlebih dahulu sehingga akan memberikan tingkat keamanan terhadap penyebaran virus yang lebih tinggi. Masyarakat yang takut untuk tes akan memilih di rumah saja sehingga program PPKM akan lebih maksimal.

PENUTUP

Sejak masa pertama kali kasus COVID-19 ada di Indonesia hingga saat ini, sudah banyak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah guna menangani pandemi ini. Dari kebijakan-kebijakan tersebut dapat diambil banyak pembelajaran.

Pembelajaran tersebut yang menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan kebijakan selanjutnya. Karena kebijakan harus bersifat *sustainable* agar dampaknya dapat terlihat. Respon awal juga merupakan kunci utama pencegahan penyebaran COVID-19. Respon-respon inilah yang menjadi pijakan pertama dan kunci dalam menentukan kebijakan jangka panjang. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan lainnya sangat penting dalam pelaksanaan program PPKM. Dari program PPKM ini, kita dapat mengambil banyak pembelajaran yakni delapan pembelajaran. Dari pembelajaran diharapkan dari penelitian ini akan menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan utamanya mengenai perbaikan dalam penanganan COVID-19 serta bisa menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kegiatan penelitian ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang ikut membantu dalam memberi saran dalam penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

A.M. Sardiman. 1986. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Rajawali: Jakarta.

Alam, Sarah Oktaviyany. 2020. "Indonesia Resmi Beli Vaksin COVID-19 AstraZeneca-Novavax 50 Juta Dosis". Diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5316038/indonesia-resmi-beli-vaksin-covid-19-astrazeneca-novavax-50-juta-dosis>. Pada tanggal 3 Maret 2020.

Amrizal, Viktor., Aini, Qurrotul. 2013. *Kecerdasan Buatan*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing.

CNN Indonesia. 2020. "Jejak Corona dan PSBB Surabaya Raya Sampai Masa Transisi". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200609095338-20-511297/jejak-corona-dan-psbb-surabaya-raya-sampai-masa-transisi>. Pada tanggal 3 Maret 2020.

Creswell, 1998. *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications Inc https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswell,+1998.+Qualitative+Inquiry:+Choosing+Among+Five+Traditions.+USA:+Sage+Publications+Inc&ots=ho7abMTTx&sig=tSuJMPVLpr7Mk7_aaUBI07GzCDc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Fadli, Rizal. 2020. "WHO Resmi Nyatakan Corona Sebagai Pandemi". Diakses dari <https://www.halodoc.com/penelitian/who-resmi-nyatakan-corona-sebagai-pandemi>. Pada tanggal 3 Maret 2020.

Forman, Rebecca., Atun, Rifat., McKee, Martin., Mossialos, Elias. 2020. 12 Lessons Learned from The Management of The Coronavirus Pandemi. *Elsevier Journal of Health Policy*, No. 124, 577-580.

Haliem, Barly. 2020. "Pemprov Jatim Berlakukan Psbb Surabaya , Gresik & Sidoarjo Mulai 28 April". Diakses dari <https://regional.kontan.co.id/news/p>

- emprov-jatim-berlakukan-psbb-surabaya-gresik-sidoarjo-mulai-28-april. Pada tanggal 3 Maret 2020.
- Le, Tung Thanh., Andreadakis, Zacharias., Kumar, Arun., Román, Raúl Gómez., Tollefsen, Stig., Saville, Melanie., Mayhew, Stephen. 2020. The COVID-19 vaccine development landscape, *News & Analysis*, Vol. 19, 305-306
- Librianty, Andriana. 2021. "Evaluasi PPKM Mikro, Pemerintah Gelar Pertemuan dengan 123 Bupati dan Wali Kota". Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4484524/evaluasi-ppkm-mikro-pemerintah-gelar-pertemuan-dengan-123-bupati-dan-wali-kota>. Pada tanggal 3 Maret 2020.
- Mustinda, Lusiana. 2020. "PSBB Surabaya Resmi Berakhir, Ini Fakta Pentingnya!". Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5046608/psbb-surabaya-resmi-berakhir-ini-fakta-pentingnya>. Pada tanggal 3 Maret 2020.
- Nugraheny, Dian Erika. "UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/27/16122301/update-27-februari-1329074-kasus-covid-19-di-indonesia-tambah-6208>. Pada tanggal 28 Februari 2020.
- Nuraini Faiq, 2021, "Reses DPRD Kota Surabaya Jadi Forum Diskusi, Sosialisasikan PPKM Mikro sampai Vaksinasi", diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2021/02/17/reses-dprd-kota-surabaya-jadi-forum-diskusi-sosialisasikan-ppkm-mikro-sampai-vaksinasi>, pada tanggal 3 Maret 2020.
- Rizal, Jawahir Gustav. "Daftar 11 Daerah di Jawa Timur yang Terapkan PPKM 11-25 Januari 2021". Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/10/145700365/daftar-11-daerah-di-jawa-timur-yang-terapkan-ppkm-11-25-januari-2021?page=all>. Pada tanggal 2 Maret 2020.
- The Center for Systems Science and Engineering (ACCE) at Johns Hopkins University. 2020. "COVID-19 Dashboard". Diakses dari <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>. Pada tanggal 2 Maret 2020.
- Wijaya, Sastra. 2020. "Indonesia Kembangkan Teknologi Untuk Deteksi Virus Corona Lewat Tes Pernapasan". Diakses dari <https://www.abc.net.au/indonesian/2021-01-04/teknologi-deteksi-covid-19-indonesia-lewat-tes-pernapasan/13029550>. Pada tanggal 3 Maret 2020.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Qu, Jie-Ming., Cao, Bin., Chen, Rong-Chang. 2021. *COVID-19*. Tiongkok: Shanghai Jiao Tong University Press
- The World Bank Group Flagship Report. 2021. *Global Economics Prospects*. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

Sumber Jurnal:

- Herdiana, Dian. 2020. Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 , No. 2, 1-14.
- Nasruddin, Rindam., Haq, Islamul. 2020. Pembatasan Sosial Berskala (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 7, 639-648.

- Ristyawati, Aprista. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 2, 240-249.
- Permadhi, Putu Lantika Oka., Sudirga, I made. 2020. Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan Psbb Dalam Penanggulangan COVID-19, *Jurnal Ketha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 1355-1365
- Syaipudin, Latif. 2020. Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung). *Kalijaga Journal of Cpmunication*, Vol. 2, No.1, 14-34.
- Walletin, Gudrun., Kaziyeza, Dana., Reibersdorfer-Adelsberger, Eva. 2020. COVID-19 Intervention Scenarios for a Long-term Disease Management, *International Journal of Health Policy and Management*, Vol. 9, No. 12, 508-516.
- Wibowo, Hadiwardoyo. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat PSBB. *Jurnal : Of Business and Entrepreneurship* 2 (2).

Undang-Undang

- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/103/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).